



Model Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Zhafira Naresta Wicaksana ^{1*}, Ravindra Elvano Pradipta ², Keisya Arunika Maheswari ³

(1) Program Studi Pariwisata, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Bali, Indonesia

(2) Program Studi Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

(3) Program Studi Pariwisata, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: zhafira.naresta@unud.ac.id

Article History

Manuscript submitted:

07 September 2026

Manuscript revised:

25 September 2026

Accepted for publication:

28 September 2026

Abstract

Destination development requires collaboration among government, tourism businesses, local communities, visitors, and supporting institutions. However, tourism development in many destinations remains fragmented because stakeholder interests, authority, and resources are not adequately integrated. This study aims to formulate a stakeholder collaboration-based model for sustainable destination development. The research employed a qualitative conceptual design through a systematic review of scientific articles concerning destination governance, stakeholder collaboration, community participation, and sustainable tourism. Data were analyzed using thematic analysis by identifying recurring concepts, relationships, and implementation mechanisms. The synthesis indicates that an effective destination development model consists of five interconnected components: stakeholder mapping, shared vision formulation, collaborative institutional arrangements, joint resource mobilization, and monitoring-evaluation. Community participation, transparency, trust, and digital communication function as strengthening factors, whereas power imbalance, sectoral ego, limited capacity, and weak accountability become major barriers. The proposed model contributes theoretically by integrating stakeholder theory and collaborative governance in the context of tourism destinations. Practically, it can guide local governments and destination management organizations in designing inclusive and sustainable development programs.

Keywords

stakeholder collaboration,
destination development,
collaborative governance,
sustainable tourism,
destination management

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Wicaksana, Z. N., Pradipta, R. E., & Maheswari, K. A. (2026). Model Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Kolaborasi Pemangku Kepentingan. *Tourism and Hospitality Research*, 2(3), 114–122. <https://doi.org/10.70716/thr.v2i3.419>

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang melibatkan berbagai dimensi ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, dan lingkungan. Aktivitas pariwisata tidak hanya berkaitan dengan kunjungan wisatawan ke suatu lokasi, tetapi juga mencakup penyediaan aksesibilitas, akomodasi, atraksi, fasilitas pendukung, pelayanan, promosi, serta pengelolaan sumber daya destinasi. Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata memerlukan koordinasi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan berbeda. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan

infrastruktur, pelaku usaha menyediakan produk serta layanan wisata, masyarakat lokal menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya destinasi, sedangkan lembaga pendidikan dan organisasi nonpemerintah dapat mendukung penyediaan pengetahuan, pendampingan, dan penguatan kapasitas. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa pengembangan destinasi tidak dapat dilaksanakan secara efektif melalui pendekatan sektoral yang hanya mengandalkan satu institusi.

Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan apabila tidak disertai tata kelola yang memadai. Peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan peluang kerja, tetapi juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan, memicu perubahan fungsi ruang, memperbesar konsumsi sumber daya, serta memunculkan ketimpangan dalam distribusi manfaat. Hall (2011) menjelaskan bahwa kebijakan pariwisata berkelanjutan sering menghadapi persoalan pada tahap implementasi karena terdapat perbedaan antara tujuan kebijakan dan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakannya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi tidak cukup diukur melalui indikator pertumbuhan kunjungan atau penerimaan ekonomi. Pengelolaan destinasi juga perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan, perlindungan nilai budaya, kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan kelembagaan dalam mengendalikan dampak pariwisata.

Destinasi wisata dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan. Unsur tersebut meliputi daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, sumber daya manusia, kelembagaan, pasar, dan masyarakat. Hubungan antarunsur tersebut membentuk jaringan yang memengaruhi daya saing dan keberlanjutan destinasi. Baggio, Scott, dan Cooper (2010) menunjukkan bahwa analisis jaringan dapat digunakan untuk memahami hubungan antaraktor dalam sistem pariwisata. Perspektif jaringan penting karena aktor dalam destinasi tidak bekerja secara terpisah. Keputusan pemerintah dapat memengaruhi pelaku usaha, kegiatan usaha dapat memengaruhi masyarakat, dan perilaku wisatawan dapat memengaruhi kondisi sosial serta lingkungan. Dengan demikian, pengembangan destinasi memerlukan mekanisme yang mampu menghubungkan kepentingan, sumber daya, dan tanggung jawab antaraktor.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami hubungan tersebut adalah teori pemangku kepentingan. Freeman (1984) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan merupakan pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks pariwisata, pemangku kepentingan mencakup pemerintah pusat dan daerah, organisasi pengelola destinasi, pelaku usaha, masyarakat lokal, wisatawan, lembaga pendidikan, komunitas, organisasi nonpemerintah, serta pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan destinasi. Setiap aktor memiliki tingkat pengaruh, kepentingan, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda. Pemerintah dapat memiliki kewenangan regulatif, pelaku usaha memiliki sumber daya ekonomi, masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan legitimasi sosial, sedangkan lembaga pendidikan memiliki kapasitas penelitian dan pengembangan. Perbedaan tersebut perlu dikelola melalui pemetaan aktor agar peran dan kepentingan setiap pihak dapat dipahami secara sistematis.

Pendekatan pemangku kepentingan juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan tidak seharusnya hanya berorientasi pada kepentingan aktor yang memiliki kekuasaan terbesar. Dalam pengembangan destinasi, masyarakat lokal perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan kebutuhan, pengetahuan, dan kekhawatiran mereka. Keterlibatan tersebut penting karena masyarakat berhadapan langsung dengan perubahan yang ditimbulkan oleh aktivitas pariwisata. Waligo, Clarke, dan Hawkins (2013) menempatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam perencanaan pariwisata berkelanjutan. Keterlibatan yang dirancang secara baik dapat meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan, memperkuat rasa memiliki, dan membantu memastikan bahwa program pariwisata sesuai dengan kondisi lokal. Sebaliknya, partisipasi yang bersifat formalitas dapat membatasi kontribusi masyarakat dan tidak mampu mengurangi konflik kepentingan.

Kolaborasi menjadi pendekatan penting karena pengembangan destinasi membutuhkan sumber daya yang tidak dimiliki oleh satu aktor saja. Kolaborasi tidak hanya berarti kehadiran banyak pihak dalam suatu forum, tetapi juga mencakup proses dialog, perumusan tujuan bersama, pembagian peran, pertukaran sumber daya, pelaksanaan program, serta evaluasi secara bersama. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* menempatkan aktor publik dan nonpublik dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus dan deliberasi. Dalam konteks destinasi wisata, kolaborasi dapat digunakan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, menghubungkan pelaku usaha dengan sumber daya lokal, serta mengintegrasikan program promosi dengan pengelolaan lingkungan dan budaya.

Meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi, kolaborasi tidak selalu berlangsung secara mudah. Perbedaan kepentingan, ketimpangan kekuasaan, keterbatasan kapasitas, rendahnya kepercayaan, dan lemahnya koordinasi dapat menghambat proses kolaboratif. Bramwell dan Lane (2011) menegaskan bahwa tata kelola pariwisata berkelanjutan memerlukan perhatian terhadap hubungan kekuasaan, kapasitas kelembagaan, dan proses pembelajaran kebijakan. Apabila forum kolaborasi hanya didominasi oleh pemerintah atau pelaku usaha, maka masyarakat dan kelompok yang memiliki daya tawar rendah dapat mengalami keterbatasan dalam menyampaikan kepentingannya. Selain itu, kolaborasi yang tidak memiliki pembagian tugas dan mekanisme akuntabilitas yang jelas berisiko menghasilkan kesepakatan yang tidak diikuti tindakan nyata.

Keberhasilan kolaborasi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemangku kepentingan dalam membangun visi bersama. Setiap aktor dapat memiliki tujuan yang berbeda. Pemerintah mungkin menekankan peningkatan pendapatan daerah, pelaku usaha berfokus pada keuntungan, masyarakat mengutamakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan ruang hidup, sedangkan organisasi lingkungan menekankan pengendalian dampak ekologis. Perbedaan tujuan tersebut tidak harus dihilangkan, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka tujuan destinasi yang disepakati bersama. Visi bersama dapat menjadi dasar untuk menyusun prioritas program, menetapkan indikator keberhasilan, dan mengurangi tumpang tindih kewenangan. Tanpa visi bersama, program pengembangan destinasi cenderung berjalan sendiri-sendiri dan sulit menghasilkan dampak yang terintegrasi.

Selain visi bersama, pengembangan destinasi memerlukan kelembagaan yang mampu mengatur hubungan antaraktor. Kelembagaan tersebut dapat berbentuk forum komunikasi, badan pengelola destinasi, kelompok kerja, atau bentuk organisasi lain yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Kelembagaan kolaboratif perlu memiliki fungsi yang jelas, prosedur pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, mekanisme penyelesaian konflik, serta sistem pelaporan. Kelembagaan tidak hanya dibutuhkan untuk mengoordinasikan kegiatan, tetapi juga untuk menjaga kesinambungan kerja sama ketika terjadi perubahan kepemimpinan, kebijakan, atau kondisi pasar. Dalam perspektif jaringan pariwisata, kelembagaan tersebut berfungsi sebagai penghubung antaraktor dan sebagai sarana pertukaran informasi serta sumber daya (Baggio et al., 2010).

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah mobilisasi sumber daya. Pengembangan destinasi tidak hanya membutuhkan anggaran, tetapi juga pengetahuan, tenaga kerja, teknologi, jejaring pemasaran, lahan, infrastruktur, dan legitimasi sosial. Setiap pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Pemerintah dapat menyediakan regulasi dan infrastruktur, pelaku usaha dapat mendukung investasi serta pengembangan produk, masyarakat dapat menyediakan pengetahuan lokal dan pengalaman budaya, sedangkan lembaga pendidikan dapat membantu penelitian dan peningkatan kompetensi. Kolaborasi memungkinkan sumber daya tersebut digunakan secara lebih terarah. Namun, proses mobilisasi harus disertai transparansi agar kontribusi dan manfaat setiap pihak dapat dipahami secara terbuka.

Perkembangan teknologi informasi juga memengaruhi pengelolaan destinasi. Platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi, mempromosikan produk, menerima umpan balik wisatawan, dan memfasilitasi komunikasi antarpemangku kepentingan. Meskipun demikian, teknologi bukan pengganti kelembagaan dan partisipasi langsung. Penggunaan teknologi perlu ditempatkan sebagai instrumen pendukung dalam proses koordinasi dan pengambilan keputusan. Pemanfaatannya juga harus mempertimbangkan kesenjangan akses dan kemampuan digital di antara pemangku kepentingan. Dengan demikian, digitalisasi perlu dikembangkan secara inklusif agar tidak hanya menguntungkan aktor yang memiliki akses teknologi lebih baik.

Kajian mengenai kolaborasi pemangku kepentingan dalam pariwisata telah berkembang, tetapi masih terdapat ruang untuk menyusun kerangka yang menghubungkan tahapan kolaborasi dengan proses pengembangan destinasi secara lebih sistematis. Sebagian kajian menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, sementara kajian lain berfokus pada tata kelola, jaringan aktor, atau keberlanjutan. Pemisahan fokus tersebut dapat menyulitkan pemerintah daerah dan pengelola destinasi dalam menerjemahkan konsep kolaborasi menjadi langkah operasional. Oleh sebab itu, diperlukan model yang mengintegrasikan pemetaan pemangku kepentingan, perumusan visi bersama, penguatan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada perumusan model pengembangan destinasi wisata berbasis kolaborasi pemangku kepentingan. Permasalahan utama penelitian terletak pada bagaimana mengintegrasikan peran, kepentingan, dan sumber daya berbagai aktor ke dalam suatu mekanisme pengembangan destinasi yang terarah dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi komponen utama kolaborasi pemangku kepentingan dan merumuskan hubungan antarkomponen tersebut dalam pengembangan destinasi wisata. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan hubungan antara teori pemangku kepentingan dan pendekatan collaborative governance dalam studi pariwisata. Secara praktis, model yang dirumuskan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, organisasi pengelola destinasi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merancang program pengembangan yang lebih terkoordinasi, inklusif, dan dapat dievaluasi.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan pustaka sistematis. Desain tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada identifikasi, perbandingan, dan sintesis konsep mengenai pengembangan destinasi wisata berbasis kolaborasi pemangku kepentingan. Penelitian tidak menggunakan data primer dari responden atau observasi lapangan, tetapi memanfaatkan temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan komponen dan hubungan antarkomponen dalam model pengembangan destinasi wisata.

Sumber Data dan Unit Analisis

Sumber data penelitian berupa artikel ilmiah yang membahas collaborative governance, stakeholder collaboration, destination management, community participation, dan sustainable tourism. Artikel yang dianalisis diterbitkan pada periode 2015 sampai 2025. Unit analisis penelitian adalah konsep, pendekatan, temuan, dan rekomendasi yang terdapat dalam artikel terpilih. Fokus analisis diarahkan pada peran pemangku kepentingan, bentuk kolaborasi, mekanisme koordinasi, partisipasi masyarakat, mobilisasi sumber daya, serta evaluasi pengembangan destinasi.

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect. Basis data tersebut digunakan untuk memperoleh artikel ilmiah yang relevan dan memiliki keterlacakan akademik. Kata kunci yang digunakan meliputi collaborative governance, stakeholder collaboration, destination

management, community participation, dan sustainable tourism. Kata kunci digunakan secara tunggal dan dikombinasikan untuk memperluas serta memfokuskan hasil penelusuran sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik Pemilihan Artikel

Pemilihan artikel dilakukan berdasarkan kesesuaian antara topik artikel dan fokus penelitian. Artikel dimasukkan ke dalam kajian apabila membahas pengelolaan destinasi, hubungan antarpemangku kepentingan, tata kelola kolaboratif, partisipasi masyarakat, atau keberlanjutan pariwisata. Artikel juga dipertimbangkan berdasarkan kejelasan tujuan, metode, pembahasan, dan temuan penelitian. Artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan destinasi wisata berbasis kolaborasi tidak digunakan dalam proses sintesis.

Proses pemilihan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi artikel berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Tahap kedua adalah menelaah judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian awal. Tahap ketiga adalah membaca isi artikel secara menyeluruh untuk mengidentifikasi konsep dan temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tahap terakhir adalah mengelompokkan artikel berdasarkan tema utama yang muncul. Proses tersebut digunakan untuk menjaga konsistensi antara tujuan penelitian, sumber data, dan hasil analisis.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap artikel yang telah dipilih. Informasi yang dicatat meliputi identitas artikel, fokus penelitian, konsep utama, konteks kajian, bentuk keterlibatan pemangku kepentingan, mekanisme kolaborasi, faktor pendukung, hambatan, serta implikasi bagi pengembangan destinasi. Pencatatan dilakukan secara sistematis agar informasi dari setiap artikel dapat dibandingkan.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik. Tahap analisis dimulai dengan membaca artikel secara berulang untuk memahami isi dan konteks penelitian. Selanjutnya, peneliti memberikan kode terhadap informasi yang berkaitan dengan fokus kajian. Kode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tema yang lebih luas, yaitu pemetaan pemangku kepentingan, visi bersama, kelembagaan kolaboratif, mobilisasi sumber daya, dan monitoring-evaluasi. Tema yang telah terbentuk dibandingkan antar artikel untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan hubungan konseptual.

Tahap akhir analisis dilakukan melalui sintesis naratif. Sintesis ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antar tema dan merumuskan model pengembangan destinasi wisata berbasis kolaborasi pemangku kepentingan. Model disusun berdasarkan keterkaitan logis antara identifikasi aktor, penyusunan tujuan bersama, pembentukan mekanisme kelembagaan, pemanfaatan sumber daya, serta evaluasi keberlanjutan destinasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa lembar dokumentasi dan matriks analisis literatur. Lembar dokumentasi digunakan untuk mencatat karakteristik dan isi artikel, sedangkan matriks analisis digunakan untuk membandingkan konsep serta temuan antarsumber. Konsistensi analisis dijaga dengan menggunakan kriteria pemilihan, kata kunci, dan kategori tematik yang sama pada seluruh artikel yang ditelaah. Dengan prosedur tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan sintesis yang terarah dan dapat ditelusuri.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata berbasis kolaborasi pemangku kepentingan terdiri atas lima komponen utama, yaitu pemetaan aktor, perumusan visi bersama, pembentukan kelembagaan kolaboratif, mobilisasi sumber daya, serta monitoring dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki hubungan berurutan dan saling memperkuat. Pemetaan aktor menjadi dasar untuk memahami kepentingan, kewenangan, pengaruh, dan kapasitas setiap pihak. Tahap tersebut diperlukan agar proses pengembangan destinasi tidak hanya berorientasi pada aktor yang memiliki kewenangan formal, tetapi juga mempertimbangkan peran masyarakat, pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan organisasi nonpemerintah. Temuan ini sesuai dengan teori pemangku kepentingan yang menempatkan identifikasi aktor sebagai bagian penting dalam pengelolaan organisasi dan kebijakan (Freeman, 1984).

Tabel 1. Komponen model dan fokus pengelolaan

Komponen model	Fokus pengelolaan	Hasil yang diharapkan
Pemetaan aktor	Identifikasi kepentingan, pengaruh, kewenangan, dan kapasitas	Peta peran pemangku kepentingan
Visi bersama	Penyelarasan tujuan dan prioritas pembangunan	Kesepakatan arah pengembangan destinasi
Kelembagaan kolaboratif	Pengaturan forum, peran, kewenangan, dan akuntabilitas	Mekanisme koordinasi antaraktor
Mobilisasi sumber daya	Penggabungan anggaran, pengetahuan, jejaring, teknologi, dan tenaga	Pelaksanaan program yang terintegrasi
Monitoring dan evaluasi	Penilaian manfaat, dampak, dan keberlanjutan	Perbaikan kebijakan dan program

Komponen kedua adalah perumusan visi bersama. Setiap pemangku kepentingan dapat memiliki kepentingan yang berbeda dalam pengembangan destinasi. Pemerintah dapat memprioritaskan peningkatan ekonomi daerah, pelaku usaha berfokus pada pengembangan produk dan keuntungan, sedangkan masyarakat mengutamakan kesejahteraan serta perlindungan sosial dan budaya. Perbedaan tersebut memerlukan ruang dialog agar dapat dirumuskan menjadi tujuan bersama. Dalam perspektif collaborative governance, dialog langsung, kepercayaan, komitmen, dan kesepahaman bersama merupakan unsur penting dalam membangun kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Visi bersama juga berfungsi sebagai dasar penyusunan program, pembagian peran, serta penetapan indikator keberhasilan destinasi.

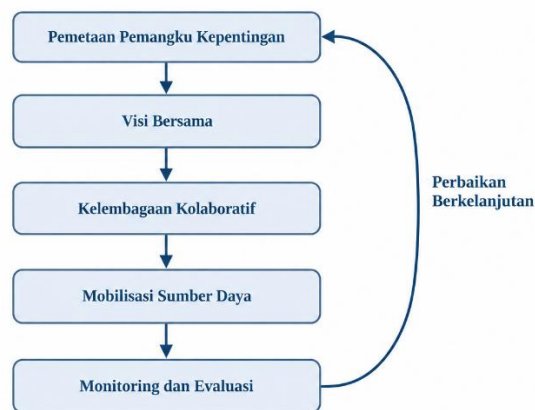
Kelembagaan kolaboratif menjadi komponen ketiga yang menghubungkan kesepakatan dengan pelaksanaan program. Kelembagaan dapat berupa forum koordinasi, kelompok kerja, atau organisasi pengelola destinasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kelembagaan diperlukan untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan, memperlancar pertukaran informasi, dan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik. Bramwell dan Lane (2011) menjelaskan bahwa tata kelola pariwisata berkelanjutan memerlukan kapasitas kelembagaan yang mampu mengelola perbedaan kepentingan dan mendukung proses pembelajaran kebijakan. Selain itu, hubungan antaraktor dalam destinasi perlu dipahami sebagai jaringan, karena setiap keputusan dan sumber daya dapat memengaruhi aktor lain (Baggio et al., 2010).

Komponen keempat adalah mobilisasi sumber daya. Kolaborasi tidak hanya berkaitan dengan penyatuan anggaran, tetapi juga mencakup pemanfaatan pengetahuan lokal, kapasitas sumber daya manusia, teknologi, jejaring pemasaran, infrastruktur, dan legitimasi sosial. Pemerintah memiliki peran dalam penyediaan regulasi dan fasilitas publik, pelaku usaha berkontribusi melalui investasi dan

pengembangan produk, sedangkan masyarakat menyediakan pengetahuan lokal serta pengalaman budaya. Mobilisasi sumber daya perlu dilakukan secara transparan agar kontribusi setiap pihak dan distribusi manfaat dapat dipantau. Keterlibatan masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan, bukan hanya sebagai penerima program. Hal ini sejalan dengan Waligo, Clarke, dan Hawkins (2013) yang menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

Komponen terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Pengembangan destinasi tidak cukup dinilai berdasarkan peningkatan jumlah kunjungan atau pendapatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan manfaat sosial, perlindungan budaya, kondisi lingkungan, dan pemerataan manfaat ekonomi. Monitoring menyediakan informasi untuk menilai kesesuaian antara program dan tujuan yang telah disepakati. Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan, memperbaiki pembagian peran, serta menyesuaikan kebijakan dengan perubahan kondisi destinasi. Hall (2011) menegaskan bahwa kelemahan implementasi kebijakan berkelanjutan sering muncul karena tujuan kebijakan tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan dan mekanisme evaluasi yang memadai. Berdasarkan hasil sintesis tersebut, model pengembangan destinasi wisata berbasis kolaborasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Model Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan



Gambar 1. Model Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Model tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan kegiatan satu kali. Monitoring dan evaluasi memberikan umpan balik bagi pemetaan ulang aktor, penyesuaian visi, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan sumber daya. Faktor pendukung utama dalam model ini adalah transparansi, kepercayaan, partisipasi masyarakat, komunikasi, dan pembagian manfaat yang adil. Sebaliknya, ketimpangan kekuasaan, ego sektoral, keterbatasan kapasitas, rendahnya kepercayaan, serta lemahnya akuntabilitas dapat menghambat pelaksanaan kolaborasi. Dengan demikian, model ini memiliki implikasi praktis bagi pemerintah daerah dan organisasi pengelola destinasi untuk membangun forum kolaborasi dengan mandat, struktur kerja, indikator kinerja, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Kesimpulan

Penelitian ini merumuskan model pengembangan destinasi wisata berbasis kolaborasi pemangku kepentingan melalui lima komponen utama, yaitu pemetaan aktor, perumusan visi bersama,

pembentukan kelembagaan kolaboratif, mobilisasi sumber daya, serta monitoring dan evaluasi. Kelima komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk proses pengembangan destinasi yang berkelanjutan. Pemetaan aktor membantu mengidentifikasi kepentingan, kewenangan, pengaruh, dan kapasitas setiap pihak. Visi bersama diperlukan untuk menyelaraskan tujuan yang berbeda, sedangkan kelembagaan kolaboratif berfungsi mengatur koordinasi, pembagian peran, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas. Mobilisasi sumber daya memungkinkan pemanfaatan anggaran, pengetahuan, teknologi, jejaring, serta kapasitas masyarakat secara terpadu. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sekaligus memperbaiki pelaksanaan program. Secara teoretis, model ini memperkuat penerapan teori pemangku kepentingan dan collaborative governance dalam pengembangan destinasi wisata. Secara praktis, pemerintah daerah dan organisasi pengelola destinasi dapat menggunakan model ini sebagai dasar penyusunan forum koordinasi, program kerja, indikator kinerja, dan mekanisme pertanggungjawaban. Penelitian selanjutnya perlu menguji model ini melalui studi empiris pada destinasi tertentu dengan menggunakan data lapangan yang dapat menggambarkan efektivitas kolaborasi secara lebih terukur.

Daftar Pustaka

- Aas, C., Ladkin, A., & Fletcher, J. (2005). Stakeholder collaboration and heritage management. *Annals of Tourism Research*, 32(1), 28–48. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.04.005>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Baggio, R., Scott, N., & Cooper, C. (2010). Network analysis in tourism: Concepts and case studies. *Tourism Management*, 31(2), 227–238. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.02.003>
- Beritelli, P., Bieger, T., & Laesser, C. (2007). Destination governance: Using corporate governance theories as a foundation for effective destination management. *Journal of Travel Research*, 46(1), 96–107. <https://doi.org/10.1177/0047287507302385>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- d'Angella, F., & Go, F. M. (2009). Tale of two cities' collaborative tourism marketing: Towards a theory of destination stakeholder assessment. *Tourism Management*, 30(3), 353–361. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.07.008>
- Dredge, D. (2006). Networks, conflict and collaborative communities. *Journal of Sustainable Tourism*, 14(6), 562–581. <https://doi.org/10.2167/jost548.0>
- Hall, C. M. (2011). Policy learning and policy failure in sustainable tourism governance: From first- and second-order to third-order change? *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 649–671. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.621088>
- Haugland, S. A., Ness, H., Grønseth, B. O., & Aarstad, J. (2011). Development of tourism destinations: An integrated multilevel perspective. *Annals of Tourism Research*, 38(1), 268–290. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.08.008>
- Jamal, T. B., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. *Annals of Tourism Research*, 22(1), 186–204. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00067-4](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00067-4)
- Kimbu, A. N., & Ngoasong, M. Z. (2013). Centralised decentralisation of tourism development: A network perspective. *Tourism Management*, 34, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.03.006>
- Nunkoo, R. (2017). Governance and sustainable tourism: What is the role of trust, power and social capital? *Journal of Sustainable Tourism*, 25(4), 1–18. <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1209401>
- Ruhanen, L., Scott, N., Ritchie, B., & Tkaczynski, A. (2010). Governance: A review and synthesis of the literature. *Tourism Review*, 65(4), 4–16. <https://doi.org/10.1108/16605371011093836>

- Saito, H., & Ruhanen, L. (2017). Power in tourism stakeholder collaborations: Power types and power holders. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 31, 189–196. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.12.001>
- Sautter, E. T., & Leisen, B. (1999). Managing stakeholders: A tourism planning model. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 312–328. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00023-8](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00023-8)
- Saxena, G. (2005). Relationships, networks and the learning regions: Case evidence from the Peak District National Park. *Tourism Management*, 26(2), 277–289. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.11.013>
- Timur, S., & Getz, D. (2008). A network perspective on managing stakeholders for sustainable urban tourism. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 20(4), 445–461. <https://doi.org/10.1108/09596110810873543>
- Volgger, M., & Pechlaner, H. (2014). Requirements for destination management organizations in destination governance: Understanding DMO success. *Tourism Management*, 41, 64–75. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.01.018>
- Waligo, V. M., Clarke, J., & Hawkins, R. (2013). Implementing sustainable tourism: A multi-stakeholder involvement management framework. *Tourism Management*, 36, 342–353. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.10.008>
- Wang, Y., & Fesenmaier, D. R. (2007). Collaborative destination marketing: A case study of Elkhart County, Indiana. *Tourism Management*, 28(3), 863–875. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.02.007>